

## **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGNA DANA DESA TAHUN 2021 DESA MUARA PULUTAN KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Ulfa Trianita<sup>1</sup>, Hesti Setiorini<sup>1</sup>, Ahmad Junaidi<sup>1</sup>, Diah Khairiyah<sup>1</sup>, Marin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: [ulfatrianita9277@gmail.com](mailto:ulfatrianita9277@gmail.com)

### **ARTICLE HISTORY**

*Received [03-11-2021]*

*Revised [04-03-2022]*

*Accepted [12-03-2022]*

### **ABSTRAK**

Desa Muara Pulutan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Pulutan Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa Muara Pulutan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Pulutan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan luas wilayah Muara Pulutan 500,60 Ha. Iklim di desa Muara Pulutan memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan di desa Muara pulutan Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Agama yang berada di Desa Sidodadi mayoritas beragama Islam. Pekerjaan warga di Desa Muara Pulutan sebagian besar Petani/Pekebun berjumlah 115 orang, pedagang 22 orang, peternak 13 orang, pegawai 8 orang dan swasta 81 orang. Untuk mengembangkan taraf kesejahteraan di masyarakat desa, pemerintah mengadakan program dana desa yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap desa. Dengan anggaran besar tersebut, pemerintah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sangat terinci agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan dana desa. Permasalahan yang muncul adalah dengan diterapkannya peraturan pemerintah yang mengatur langsung penyusunan laporan keuangan desa, pemerintah desa tidak lagi bisa sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa penggunaan anggaran dan penggunaan anggaran ada pada seorang kepala desa. Untuk menyesuaikan peraturan pemerintah dalam laporan keuangan desa, bendahara desa sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan yang di terapkan pemerintah karena selama ini untuk pelaporannya belum sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan desa dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bagaimana mengelola data yang baik agar untuk meminimalisir kesalahan laporan keuangan.

**Kata kunci :** Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas, dan Transparan.

### **I. PENDAHULUAN**

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan wadah untuk Dapat

Mengembangkan dan menyumbangkan pengetahuan secara langsung kepada Masyarakat suatu pendidikan mahasiswa yang dilakukan dengan cara

memberikan pengalaman belajar secara nyata, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata lapangan dalam bidang membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sebagai kegiatan kelompok yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan dan pendidikan, keagamaan, seni dan olahraga serta kegiatan tematik non tematik yang diharapkan mampu untuk memberikan solusi serta membantu menangani masalah-masalah yang sifatnya majemuk secara terstruktur.

Dalam abdimas ini juga tetap konsisten menjalankan program kerja dalam lingkup sehingga di tuntut untuk bekerja secara profesional dalam menyelesaikan program yang di dapat dari masyarakat dan di kembangkan ke masyarakat semula, karena kebutuhan itu datang dari masyarakat Kuliah Kerja Nyata, (KKN) merupakan suatu program yang dirancang oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang menuntut mahasiswa agar dapat mengaplikasikan pembangunan di suatu wilayah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Permasalahan dalam tahap pelaporan dana desa masih dianggap membingungkan karena analisis penggunaan dana desa yang selalu berbeda setiap tahunnya sesuai kebutuhan desa, diduga banyak pengaduan dari desa terkait pelaporan keuangan Dana Desa (Y. Yusmaniarti & Ekowati, 2019). Hal ini terjadi karena pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan negara (pemerintah pusat).

Oleh karena itu, pelaporan keuangan Dana Desa merupakan suatu keharusan, dan potensi masalah sudah terlihat jika ketersediaan sumber daya

manusia tidak memadai/mendukung (Yusmaniarti, Marini, 2021). Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meletakkan dasar bagi otonomi desa dalam praktiknya tidak hanya bersifat preskriptif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan, pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dan dengan adanya keuangan desa sehingga diharapkan desa dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran baik dari sisi penerimaan maupun sumber pendapatan maupun dalam pengelolaan belanja anggaran (Ferina et al., 2020)

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi (Setiorini et al., 2020). Oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk kedepannya sehingga pertanggungjawaban pelaporan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan keuangan desa merupakan bentuk perlunya transparansi yang merupakan prasyarat untuk menjaga tanggung jawab berupa keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber daya publik (Paidi Paidi, Yusmaniarti, Y., 2017).

Kegiatan Dana Desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan

dan pengawasan ini dapat dilimpahkan kepada perangkat desa atau kepada BPD (L. N. S. Yusmanti & Ummul Khair, 2021) Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga dengan adanya hal tersebut maka diperlukan akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Pulutan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Desa Muara Pulutan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **Analisis Situasi**

Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur langsung penyusunan laporan keuangan desa, pemerintah desa tidak lagi bisa sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan penggunaan anggaran ada pada seorang kepala desa. Untuk menyesuaikan peraturan pemerintah dalam laporan keuangan desa, bendahara desa sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan yang di terapkan pemerintah karena selama ini untuk pelaporannya belum sesuai standar akuntansi yang berlaku (Charolina et al., (2020); Yuniarti, (2021)

#### **Tujuan :**

Ingin mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan desa dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bagaimana mengelola data yang baik agar untuk meminimalisir kesalahan laporan keuangan.

## **II. METODE KEGIATAN**

Pelaksanaann program

pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Muara Pulutan Kecamatan seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Sasaran kegiatan ini adalah kantor Desa Muara Pulutan. Kegiatan ini berlangsung dalam 1 kali pertemuan agar mengurangi kerumunan. Adapun kegiatan yang dillaksanakan yaitu smemberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuang desa yang sesuai dengan standar kuangan yang diterapkan pemerintah dalam pelaporan keuangan desa.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian dalam masyarakat dalam bentuk kegiatan pendampingan pelatihan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar kuangan yang diterapkan pemerintah dalam pelaporan keuangan desa dilaksanakan sekali pertemuan. Kegiatan ini diawali dengan bagaimana standar yang di terapkan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan yang berlaku (Suharmi, Ummul Khair, 2018).

Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan desa dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bagaimana mengelola data yang baik agar untuk meminimalisir kesalahan laporan keuangan.



**Gambar 1** Persiapan pendampingan penyusunan laporan keuangan



Gambar 2 foto bersama kepala desa muara pulutan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)



Latar Belakang dan Tujuan SAPDesa

SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban

profesional KSAP.



Proses baku penyusunan SAPDesa oleh KSAP

Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan inilah yang ditangkap pada Rapat Pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah melalui High Level Meeting lintas kementerian, sebagai tindak lanjut Rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai standard setter dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pendampingan pelatihan penyusunan laporan keuangan yang telah dilaksanakan di kantor desa Muara Pulutan berupa kegiatan Pendampingan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa, pelaporan keuangan desa Muara Pulutan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang telah dilaksanakan. Laporan kegiatan ini merupakan deskriptif dari data yang di ambil dari kondisi desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, sebagai Referensi untuk menjalankan program KKN Tematik Muhammadiyah tahun 2021 dan memberdayakan kegiatan – kegiatan yang sudah ada. Kami berharap program yang telah dilaksanakan di kantor desa Muara Pulutan ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan meskipun KKN telah selesai. Semoga masyarakat dapat mengembangkan potensi diri sehingga

dapat meningkatkan produktivitas desa. Bagi mahasiswa KKN berikutnya diharapkan bisa membuat program kegiatan yang lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu aktivitas pengabdian kepada masyarakat, Aparat Desa, Desa muara Pulutan yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Charolina, O., Faridah, F., Supawanhar, S., & Romdana, R. (2020). Upaya Peningkatan Perekonomian Keluarga Melalui Implementasi Kampung Tematik Di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(2), 385–392.

<https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i2.949>

Ferina, Z. I., Hanila, S., Fitriano, Y., Susanti, N., & Soleh, A. (2020). Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumdes Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(1), 324–333.

<https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i1.752>

Paidi Paidi, Yusmaniarti, Y., D. W. (2017). *Membuat Laporan Keuangan Menggunakan MYOB Versi 19.6* (S. Empat (ed.); Edisi 1). Salemba Empat Jakarta.

Setiorini, H., Yusmaniarti, Y., & Marini, M. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sekolah Langit Biru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(3),

393–398.

<https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i3.1021>

Suharmi, Ummul Khair, D. K. (2018). Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Kapabilitas Pengurus Koperasi Melalui Pelatihan Administrasi Keuangan Di Koperasi Aisyiyah Pda Se Wilayah Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(3), 453–460.

Yuniarti, R. (2021). *PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI JASA KARISMA BERBASIS APLIKASI GL (GENERAL LEDGER)*. 01(02), 99–102.

Yusmaniarti, Marini, U. K. (2021). *PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASAKAN SAK SYARIAH SEBAGAI PERSIAPAN RAT PADA KOPERASI SYARIAH CAHAYA TANI*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 215–225.

Yusmaniarti, L. N. S., & Ummul Khair, M. (2021). Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Journal – Bussiness Management and Accounting*, 2(2), 123–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>

Yusmaniarti, Y., & Ekowati, S. (2019). Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Media Excel For Accounting (EFA). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(1).